

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel dan responden adalah seluruh anggota dewan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner pada DPRD Provinsi Lampung. Responden terdiri dari 40 responden. Data yang telah dikumpulkan dianalisis sesuai dengan teknik analisis yang dipilih untuk mencapai tujuan penelitian. Data sampel penelitian dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1
Data Sampel Penelitian

No	Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung	Jumlah Kuisioner
1	Hi. Dedi Afrizal, S.Kep., M.H	1
2	Hi. Imer Darius, S.E	1
3	Hi. Pattimura, S.E	1
4	Hi. Ismet Roni, S.H., M.H	1
5	Ir. Hi. Johan Sulaiman, M.M	1
6	Bambang Suryadi, S.H	1
7	Mingrum Gumay, S.H., M.H	1
8	Edi Rusdianto, S.H., M.M	1
9	Hi. M. Rizal, S.E	1
10	Ir. Kadek Suwartika, M.H	1
11	Hj. Syafariah Widianti ZP, S.H., M.H	1
12	Drs. Hi. Tulus Purnomo W	1
13	Dra. Hj. Martalena	1
14	Hi. Yandri Nazir, M.M	1
15	Drs. Hi. Mozes Herman	1

16	M. Junaidi, S.H	1
17	Elly Wahyuni, S.E., M.M	1
18	Drs. Hi. Mikdar Ilyas, M.M	1
19	Hi. Eddy Hamin, S.E., MBA	1
20	Ikhwan Fadil Ibrahim, S.H	1
21	Hj. Ririn Kuswantari, S.Sos	1
22	Hi. Tony Eka Candra	1
23	Drs. Hi. Azwar Yacub	1
24	Ali Imron, S.Pil	1
25	Ir. Hantoni Hasan, M.Si	1
26	Hi. Ahmad Mufti Salim, Lc., M.A	1
27	Hi. Ade Utami Ibnu, S.E	1
28	Joko Santoso, S.P., M.H	1
29	Muswir, A.Md	1
30	Abdullah Surajaya, S.H	1
31	Amrullah Ahmad El Hakim, S.H	1
32	Hi. Garinca Reza Pahlevi, S.I., Kom	1
33	Budi Yuhanda., S.H., M.Kn	1
34	Hi. Sahyana, S.E	1
35	Hidir Ibrahim, M.Si	1
36	Khaidir Bujung, S.Ag	1
37	Hi. Noverisman Subing, S.H	1
38	Hi. Mc. Iman Santoson, S.H., M.H	1
39	Hi. Hali Fahmi AR, S.E., Akt	1
40	Hi. Yozi Rizal, S.H	1
Total Kuisisioner		40

Sumber: Data primer diolah, 2018

Adapun gambaran karakteristik data kuisisioner dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Karakteristik Data Kuesioner

No.	Keterangan	Jumlah Kuesioner
1	Kuesioner yang disebar	40
2	Kuesioner yang direspon	40
3	Kuesioner yang tidak direspon	0
4	Persentase Pengembalian	100 %
5	Kuesioner yang tidak dapat digunakan	0
6	Kuesioner yang dapat digunakan	40
7	Persentase Kuesioner yang dapat diolah	100 %

Sumber: Data primer diolah, 2018

Berdasarkan table 4.2 dapat dilihat bahwa kuisisioner yang disebar dalam penelitian ini adalah sebanyak 40 kuisisioner sesuai dengan jumlah sampel dan semua kuisisioner dikembalikan, sehingga total kuisisioner yang direspon dan dapat digunakan untuk mengolah data sebanyak 40 kuisisioner atau 100% dari kuisisioner yang disebar.

4.1.2 Deskripsi Responden

Data responden berisi informasi yang disajikan, antara lain jenis kelamin, jabatan, lama bekerja dan pendidikan terakhir responden pada DPRD Provinsi Lampung. Data responden dalam penelitian dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Demografi Responden (n=40)

Keterangan		Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Pria	36	90%
	Wanita	4	10%
Jumlah		40	100%
Pendidikan Terakhir	SMA	1	2,5 %
	Diploma 1	0	-
	Diploma 3	1	2,5 %
	Strata 1 (Sarjana)	20	50 %
	Strata 2 (Master)	18	45 %
	Strata 3 (Doktor)	0	-
Jumlah		40	100%
Pengalaman Kerja	1-5 Tahun	18	47,5%
	6-10 Tahun	22	37,5%
	> 10 Tahun	6	15%
Jumlah		40	100%

Sumber: Data primer diolah, 2018

Berdasarkan demografi responden pada tabel 4.3 dapat diperoleh beberapa kesimpulan:

1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin responden digunakan untuk mengetahui keterlibatan gender dalam proses pengawasan keuangan daerah pada DPRD Provinsi Lampung. Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini didominasi oleh responden berjenis kelamin pria. Terlihat bahwa responden yang berjenis kelamin pria memiliki persentase lebih besar yaitu 90% atau sebanyak 36 responden sedangkan responden yang berjenis kelamin wanita memiliki persentase hanya 10% atau sebanyak 4 responden.

2. Pendidikan Terakhir

Pendidikan terakhir responden digunakan untuk mengetahui keterlibatan tingkat pendidikan dalam proses pengawasan keuangan daerah pada DPRD Provinsi Lampung. Jumlah responden berdasarkan Pendidikan terakhir dalam penelitian ini didominasi oleh responden dengan pendidikan terakhir Strata 1 (Sarjana). Terlihat bahwa responden dengan pendidikan terakhir Strata 1 (Sarjana) memiliki persentase lebih besar 50% atau sebanyak 20 responden, responden dengan pendidikan terakhir Strata 2 (Master) memiliki persentase 45% atau sebanyak 18 responden sedangkan responden dengan pendidikan terakhir Diploma 3 dan SMA memiliki persentase masing-masing 2,5% atau masing-masing sebanyak 1 responden dan tidak ada responden dengan pendidikan terakhir Diploma 1 dan Strata 3 (Doktor).

3. Pengalaman Kerja

Pengalaman kerja responden digunakan untuk mengetahui keterlibatan pengalaman kerja dalam proses pengawasan keuangan daerah pada DPRD Provinsi Lampung. Jumlah responden berdasarkan pengalaman kerja dalam penelitian ini didominasi oleh responden dengan pengalaman kerja selama 1-5 tahun. Terlihat bahwa responden dengan pengalaman kerja selama 1-5 tahun memiliki persentase lebih besar 47,5% atau sebanyak 19 responden, sedangkan responden dengan pengalaman kerja selama 6-10 tahun memiliki persentase 37,5% atau sebanyak 15 responden dan responden dengan pengalaman kerja selama >10 tahun memiliki persentase 15% atau sebanyak 6 responden.

4.2 Hasil

4.2.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian, antara lain nilai minimum, maksimum, *mean* dan standar deviasi. Pengukuran nilai rata-rata (*mean*) merupakan cara yang paling umum digunakan untuk mengukur nilai sentral dari suatu distribusi data, sedangkan standar deviasi merupakan perbedaan nilai data yang diteliti dengan

nilai rata-ratanya. Statistik deskriptif dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.4:

Tabel 4.4
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	40	2	5	4,06	0,5475
Partisipasi Masyarakat	40	2	5	4,11	0,595
Transparansi Kebijakan Publik	40	2	5	3,97	0,594
Akuntabilitas Publik	40	2	5	4,10	0,569
Pengawasan Keuangan Daerah	40	2	5	4,15	0,496
Valid N (listwise)	40				

Sumber : olah data SPSS V.20, 2018

Berdasarkan statistik deskriptif pada tabel 4.4 dapat diperoleh beberapa kesimpulan:

1. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran menunjukkan nilai minimum sebesar 2 dan nilai maksimum sebesar 5 serta nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,06 dengan standar deviasi sebesar 0,5475. Dari hasil pengujian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran memiliki hasil yang baik karena standar deviasi yang mencerminkan penyimpangan lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*).

2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat menunjukkan nilai minimum sebesar 2 dan nilai maksimum sebesar 5 serta nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,11 dengan standar deviasi sebesar 0,595. Dari hasil pengujian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki hasil yang baik karena standar deviasi yang mencerminkan penyimpangan lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*).

3. Transparansi Kebijakan Publik

Transparansi Kebijakan Publik menunjukkan nilai minimum sebesar 2 dan nilai maksimum sebesar 5 serta nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,97 dengan standar deviasi sebesar 0,594. Dari hasil pengujian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa transparansi kebijakan publik memiliki hasil yang baik karena standar deviasi yang mencerminkan penyimpangan lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*).

4. Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas Publik menunjukkan nilai minimum sebesar 2 dan nilai maksimum sebesar 5 serta nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,10 dengan standar deviasi sebesar 0,569. Dari hasil pengujian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas publik memiliki hasil yang kurang baik karena standar deviasi yang mencerminkan penyimpangan lebih besar dari nilai rata-rata (*mean*).

5. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan Keuangan Daerah menunjukkan nilai minimum sebesar 2 dan nilai maksimum sebesar 5 serta nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,15 dengan standar deviasi sebesar 0,496. Dari hasil pengujian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan keuangan daerah memiliki hasil yang baik karena standar deviasi yang mencerminkan penyimpangan lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*).

4.2.2 Uji Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui ketepatan instrumen dalam mengukur apa yang hendak diukur. Untuk melihat validitas masing-masing item kuesioner, digunakan uji korelasi *product moment* yang melihat *Corrected item-Correlation*. Adapun hasil uji validitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Ringkasan Hasil Analisis Validitas Instrumen

1. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Item Pertanyaan	Harga Koefisien r Hitung	Harga Koefisien r Tabel	Kesimpulan
X1.1	0,675	0,312	Valid
X1.2	0,516	0,312	Valid
X1.3	0,640	0,312	Valid
X1.4	0,560	0,312	Valid
X1.5	0,796	0,312	Valid
X1.6	0,706	0,312	Valid

Sumber : olah data SPSS V.20, 2018

2. Partisipasi Masyarakat

Item Pertanyaan	Harga Koefisien r Hitung	Harga Koefisien r Tabel	Kesimpulan
X2.1	0,420	0,312	Valid
X2.2	0,381	0,312	Valid
X2.3	0,390	0,312	Valid
X2.4	0,540	0,312	Valid
X2.5	0,464	0,312	Valid
X2.6	0,362	0,312	Valid
X2.7	0,437	0,312	Valid
X2.8	0,534	0,312	Valid
X2.9	0,498	0,312	Valid

Sumber : olah data SPSS V.20, 2018

3. Transparansi Kebijakan Publik

Item Pertanyaan	Harga Koefisien r Hitung	Harga Koefisien r Tabel	Kesimpulan
X3.1	0,512	0,312	Valid
X3.2	0,346	0,312	Valid
X3.3	0,689	0,312	Valid
X3.4	0,630	0,312	Valid
X3.5	0,576	0,312	Valid
X3.6	0,430	0,312	Valid
X3.7	0,367	0,312	Valid
X3.8	0,383	0,312	Valid

Sumber : olah data SPSS V.20, 2018

4. Akuntabilitas Publik

Item Pertanyaan	Harga Koefisien r Hitung	Harga Koefisien r Tabel	Kesimpulan
X4.1	0,546	0,312	Valid
X4.2	0,619	0,312	Valid
X4.3	0,456	0,312	Valid
X4.4	0,617	0,312	Valid
X4.5	0,351	0,312	Valid
X4.6	0,409	0,312	Valid
X4.7	0,531	0,312	Valid
X4.8	0,512	0,312	Valid
X4.9	0,380	0,312	Valid
X4.10	0,489	0,312	Valid
X4.11	0,352	0,312	Valid
X4.12	0,617	0,312	Valid
X4.13	0,405	0,312	Valid
X4.14	0,395	0,312	Valid

X4.15	0,379	0,312	Valid
X4.16	0,460	0,312	Valid
X4.17	0,394	0,312	Valid
X4.18	0,512	0,312	Valid

Sumber : olah data SPSS V.20, 2018

5. Pengawasan Keuangan Daerah

Item Pertanyaan	Harga Koefisien r Hitung	Harga Koefisien r Tabel	Kesimpulan
Y1	0,380	0,312	Valid
Y2	0,680	0,312	Valid
Y3	0,417	0,312	Valid
Y4	0,526	0,312	Valid
Y5	0,544	0,312	Valid
Y6	0,735	0,312	Valid
Y7	0,686	0,312	Valid
Y8	0,512	0,312	Valid
Y9	0,578	0,312	Valid
Y10	0,504	0,312	Valid
Y11	0,517	0,312	Valid
Y12	0,460	0,312	Valid
Y13	0,735	0,312	Valid
Y14	0,553	0,312	Valid
Y15	0,324	0,312	Valid
Y16	0,355	0,312	Valid
Y17	0,351	0,312	Valid
Y18	0,683	0,312	Valid
Y19	0,339	0,312	Valid

Sumber : olah data SPSS V.20, 2018

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen pertanyaan memiliki angka koefisien $r_{hitung} > r_{tabel}$ yaitu 0,312. Sehingga seluruh instrument penelitian tersebut dinyatakan valid.

4.2.3 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur bahwa instrumen yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan hasil yang konstan. Nilai reliabilitas dinyatakan reliabel, jika mempunyai nilai *cronbach's alpha* dari masing-masing instrumen pernyataan lebih besar dari 0,6. Adapun hasil uji validitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6
Reliability Statistic

Variabel	Nilai Reliabilitas (<i>Cronbach Alpha</i>)	Hasil	Keterangan
Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	0,802	$0,802 > 0,6$	Reliabel
Partisipasi Masyarakat	0,642	$0,642 > 0,6$	Reliabel
Transparansi Kebijakan Publik	0,779	$0,779 > 0,6$	Reliabel
Akuntabilitas Publik	0,781	$0,781 > 0,6$	Reliabel
Pengawasan Keuangan Daerah	0,793	$0,793 > 0,6$	Reliabel

Sumber: Olah data SPSS V.20 2018

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa nilai *cronbach's alpha* dari masing-masing instrumen pernyataan lebih besar dari 0,6. Sehingga dapat dinyatakan bahwa instrument dalam penelitian ini reliabel.

4.2.4 Asumsi Klasik

4.2.4.1 Uji Normalitas Data

Dalam penelitian ini uji normalitas diukur menggunakan nilai signifikan pada pada hasil analisis *one-sample kolmogorov-smirnov test* dengan dasar

pengambilan keputusan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data dalam penelitian ini dinyatakan normal. Adapun hasil uji normalitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.7
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.000000
	Std. Deviation	4.706159
Most Extreme Differences	Absolute	.136
	Positive	.136
	Negative	-.083
Kolmogorov-Smirnov Z		.859
Asymp. Sig. (2-tailed)		.452

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Olah data SPSS V.20 2018

Hasil uji normalitas dengan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* yang dipaparkan pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa tingkat signifikan sebesar 0,452 yang berarti Sig. > 0,05 (5%) yang artinya sampel terdistribusi secara normal.

4.2.4.2 Uji Multikolinearitas

Dalam penelitian ini uji multikolinearitas diukur dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Faktor* (VIF). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen, yaitu jika angka *tolerance* > 0,1 dan *Variance Inflation Faktor* (VIF) < 10. Adapun hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4.8
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1		
Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	.778	1.286
Partisipasi Masyarakat	.924	1.082
Transparansi Kebijakan Publik	.937	1.067
Akuntabilitas Publik	.768	1.303

a. Dependent Variable: Pengawasan Keuangan Daerah

Sumber : olah data SPSS V.20, 2018

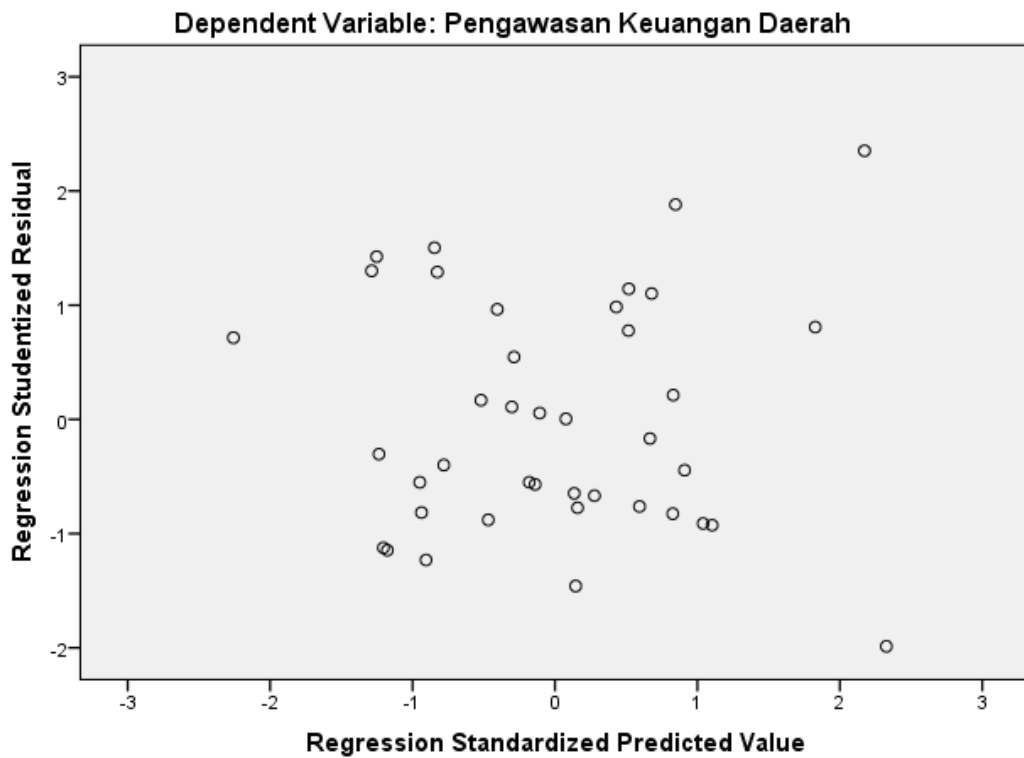
Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen memiliki angka *tolerance* > 0,1 dan VIF < 10 sehingga variabel independen dalam penelitian ini tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi.

4.2.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas diukur dengan melihat grafik *Scatter Plot* dimana model yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Adapun hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 4.9

Scatterplot



Sumber : Data diolah dengan SPSS V.20, 2018

Berdasarkan pada tabel 4.9 dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian heteroskedastisitas tidak menggambarkan pola yang jelas atau menyebar, titik-titik penyebaran berada diatas dan dibawah 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4.2.4.4 Uji Autokorelasi

Dalam penelitian ini uji autokorelasi menggunakan Uji *Durbin-Watson* (DW Tes). Adapun hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.10.

Tabel 4.10**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.271 ^a	.074	-.032	4.968	1.685

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas Publik, Transparansi Kebijakan Publik, Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

b. Dependent Variable: Pengawasan Keuangan Daerah

Sumber : Data diolah dengan SPSS V.20, 2018

Berdasarkan pada tabel 4.10 maka nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,685 dengan nilai tabel menggunakan Sisnifikan 0,05 (5%). Jumlah sampel ($n = 40$) dan jumlah variabel independen ($k = 4$, jadi $k - 1 = 3$), maka tabel *Durbin-Watson* (DW) akan didapatkan nilai sebagai berikut:

n	k = 3	
	DL	DU
40	1,3384	1,6589

Sumber : Tabel Durbin Watson

Hasil dari output yang terdapat pada tabel 4.10 nilai *Durbin-Watson* (DW) menunjukkan bahwa $DW \leq 4 - DU$ yaitu $1,685 \leq 2,3411$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

4.2.5 Uji Hipotesis

4.2.5.1 Regresi Linear Berganda

Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$PK = \alpha + \beta_1 PD + \beta_2 PM + \beta_3 TK + \beta_4 AP + \epsilon$$

Keterangan :

PK = Pengawasan Keuangan Daerah

α = Konstanta

β_1 - β_5 = Koefisien Regresi

PD = Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

PM = Partisipasi Masyarakat

TK = Transparansi Kebijakan Publik

AP = Akuntabilitas Publik

ϵ = Error

Hasil uji hipotesis regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.11.

Tabel 4.11
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	62.004	20.286		3.057	.004
1 Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	.600	.423	.262	1.420	.165
Partisipasi Masyarakat	.223	.342	.110	.652	.519
Transparansi Kebijakan Publik	-.180	.342	-.089	-.527	.602
Akuntabilitas Publik	-.004	.191	-.004	-.020	.984

a. Dependent Variable: Pengawasan Keuangan Daerah

Sumber : Data diolah dengan SPSS V.20, 2018

Berdasarkan pada tabel 4.11 hasil persamaan regresi yang diperoleh pada penelitian ini adalah :

$$PK = 62.004 + 0.600 PD + 0.223 PM - 0.180 TK - 0.004 AP + \epsilon$$

Dari hasil persamaan regresi tersebut maka dapat diartikan bahwa:

1. Nilai konstanta dalam penelitian ini sebesar 62,004 yang berarti bahwa jika variabel bebas dalam penelitian ini yaitu pengetahuan dewan tentang anggaran (X_1), partisipasi masyarakat (X_2), transparansi kebijakan publik (X_3), dan akuntabilitas publik (X_4) tidak ada atau bernilai nol maka nilai variabel terikat yaitu pengawasan keuangan daerah (Y) sebesar 62,004.
2. Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan dewan tentang anggaran sebesar 0,600 yang berarti bahwa setiap peningkatan/penurunan nilai dari variabel pengetahuan dewan tentang anggaran sebesar satu satuan prediksi akan meningkatkan (+) nilai variabel pengawasan keuangan daerah sebesar 0,600.
3. Nilai koefisien regresi variabel partisipasi masyarakat sebesar 0,223 yang berarti bahwa setiap peningkatan/penurunan nilai dari variabel partisipasi masyarakat sebesar satu satuan prediksi akan meningkatkan (+) nilai variabel pengawasan keuangan daerah sebesar 0,223.
4. Nilai koefisien regresi variabel transparansi kebijakan publik sebesar -0,180 yang berarti bahwa setiap peningkatan/penurunan nilai dari variabel transparansi kebijakan publik sebesar satu satuan prediksi akan menurunkan(-) nilai variabel pengawasan keuangan daerah sebesar -0,180.
5. Nilai koefisien regresi variabel akuntabilitas publik sebesar -0,004 yang berarti bahwa setiap peningkatan/penurunan nilai dari variabel akuntabilitas publik sebesar satu satuan prediksi akan menurunkan (-) nilai variabel pengawasan keuangan daerah sebesar -0,004.

4.2.5.2 Koefisien Determinan (R^2)

Nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai *R-Square* dari model regresi digunakan untuk mengetahui besarnya manajemen laba yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya. Adapun hasil model regresi yang diperoleh dari nilai *R-Square* pada penelitian ini dapat dilihat dari tabel 4.12.

Tabel 4.12
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.272 ^a	.074	-.032	4.850

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas Publik, Transparansi Kebijakan Publik, Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

b. Dependent Variable: Pengawasan Keuangan Daerah

Sumber : Data diolah dengan SPSS V.20, 2018

Berdasarkan pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai *R-Square* untuk variabel Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik dan Akuntabilitas Publik diperoleh sebesar 0,074. Hal ini berarti bahwa 7,4% dari Pengawasan Keuangan Daerah dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model tersebut, sedangkan sisanya sebesar 93,6% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diajukan oleh penelitian ini.

4.2.5.3 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi layak atau tidak untuk digunakan. Pengujian ini menggunakan uji F yang terdapat pada tabel Anova. Adapun hasil uji kelayakan model (uji F) pada penelitian ini dapat dilihat dari tabel 4.13.

Tabel 4.13
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	68.605	4	17.151	.695	.601 ^b
Residual	863.770	35	24.679		
Total	932.375	39			

a. Dependent Variable: Pengawasan Keuangan Daerah

b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas Publik, Transparansi Kebijakan Publik, Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Sumber : Olah data SPSS V.20,2018

Berdasarkan tabel 4.13 ANOVA diperoleh koefisien signifikan menunjukkan nilai signifikan 0,601 dengan nilai F_{hitung} 0,695 dan F_{tabel} 2,48. Hal ini berarti bahwa $Sig. > 0,05$ dan $F_{tabel} < F_{hitung}$ dan bermakna bahwa model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi Pengawasan Keuangan Daerah atau dapat dikatakan bahwa Variabel Independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah.

4.2.5.4 Uji Hipotesis (Uji T)

Uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan jika t hitung lebih kecil dari t tabel, maka H_0 diterima, sedangkan jika t hitung lebih besar dari t tabel, maka H_0 ditolak. Uji t juga dapat dilakukan dengan hanya melihat nilai signifikansi t masing-masing variabel yang terdapat pada output hasil regresi menggunakan SPSS. Adapun hasil uji t dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel 4.14.

Tabel 4.14
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	62.004	20.286		3.057	.004
1 Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	.600	.423	.262	1.420	.165
Partisipasi Masyarakat	.223	.342	.110	.652	.519
Transparansi Kebijakan Publik	-.180	.342	-.089	-.527	.602
Akuntabilitas Publik	-.004	.191	-.004	-.020	.984

a. Dependent Variable: Pengawasan Keuangan Daerah

Sumber : olah data SPSS V.20, 2018

Berdasarkan pada tabel 4.14 maka dapat dijelaskan hasil pengujian pada masing-masing hipotesis sebagai berikut :

1. Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau ($1,420 < 2,024$) dengan nilai Sig. $0,165 > 0,05$. Hal ini berarti H_0 diterima dan menolak H_1 yang artinya bahwa tidak ada pengaruh antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah.

2. Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau ($0,652 < 2,024$) dengan nilai Sig. $0,519 > 0,05$. Hal ini berarti H_0 diterima dan menolak H_2 yang artinya bahwa tidak ada pengaruh antara Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah.

3. Transparansi Kebijakan Publik Berpengaruh Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau ($-0,527 < 2,024$) dengan nilai Sig. $0,602 > 0,05$. Hal ini berarti H_0 ditolak dan menerima H_3 yang artinya bahwa tidak ada pengaruh antara Transparansi Kebijakan Publik terhadap Pengawasan Keuangan Daerah.

4. Akuntabilitas Publik Berpengaruh Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Hasil uji hipotesis keempat menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau ($-0,020 < 2,024$) dengan nilai Sig. $0,984 > 0,05$. Hal ini berarti H_0 diterima dan menolak H_4 yang artinya bahwa tidak ada pengaruh antara Akuntabilitas Publik terhadap Pengawasan Keuangan Daerah.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil analisis hipotesis pertama diketahui bahwa tidak ada pengaruh antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Pengetahuan dewan tentang anggaran yang baik belum mampu menunjang peningkatan pengawasan keuangan daerah. Secara teoritik, pelaksanaan fungsi-fungsi beserta hak, tugas, dan wewenang DPRD secara efektif hanya mungkin dilakukan oleh para anggotanya yang mempunyai tingkat kualitas tinggi. Hal ini tidak cukup hanya memiliki pengalaman dibidang sosial kemasyarakatan dan politik, melainkan juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan substansi bidang tugas lembaga legislatif yang menjadi tanggungjawabnya.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Utami dan Sofyan, 2013) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh dari variabel pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah. Sedangkan penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Juliastuti, 2013) dan (Assagaf, 2015) bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.

4.3.2 Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil analisis hipotesis kedua diketahui bahwa tidak ada pengaruh antara partisipasi masyarakat terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat maka tidak berpengaruh kepada pengawasan keuangan daerah. Pada dasarnya, partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dalam pelaksanaan otonomi daerah terutama

menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi pada pihak eksekutif. Peranan eksekutif dalam melakukan pengawasan keuangan daerah tidak dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat mengenai anggaran dan tidak dapat meningkatkan fungsi pengawasan (Safitri, 2018).

Penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Juliastuti, 2013) yang menunjukkan bahwa tidak terdapatnya pengaruh dari variabel partisipasi masyarakat terhadap pengawasan keuangan daerah. Sedangkan penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Coryanata, 2012) dan (Arianti, 2017) bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel partisipasi masyarakat terhadap pengawasan keuangan daerah.

4.3.3 Transparansi Kebijakan Publik Berpengaruh Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil analisis hipotesis ketiga diketahui bahwa tidak ada pengaruh antara transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi transparansi kebijakan publik maka tidak berpengaruh kepada pengawasan keuangan daerah. Hal ini berarti kombinasi kesesuaian transparansi kebijakan publik dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah bukanlah merupakan kesesuaian terbaik. Ini berarti bahwa transparansi kebijakan publik tidak memberikan pengaruh terhadap sikap dan perilaku anggota dewan dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawasan keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena peran transparansi kebijakan publik tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang dilakukan terhadap pemerintah khususnya anggota dewan dikarenakan adanya keterbukaan anggaran untuk masyarakat, sedangkan bagi pemerintah DPRD tidak dapat mengakses secara langsung tentang anggaran terhadap masyarakat (Lambajang, 2018).

Penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Juliastuti, 2013) dan (Arianti, 2017) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat

pengaruh dari variabel transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah. Sedangkan penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Coryanata, 2012) bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah.

4.3.4 Akuntabilitas Publik Berpengaruh Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil analisis hipotesis keempat diketahui bahwa tidak ada pengaruh antara akuntabilitas publik terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi akuntabilitas publik maka tidak berpengaruh kepada pengawasan keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena pada saat ini akuntabilitas hanya terbatas pengelolaan keuangan daerah saja, belum adanya penilaian terhadap hasil dan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Sehingga hal ini tidak memberikan pengaruh terhadap anggota dewan dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawasan keuangan daerah.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Juliastuti, 2013) dan (Lambajang, 2018) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh dari variabel akuntabilitas publik terhadap pengawasan keuangan daerah. Sedangkan penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Coryanata, 2012) bahwa terdapat pengaruh dari variabel akuntabilitas publik terhadap pengawasan keuangan daerah.